
PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN PESERTA KB PADA KAMPUNG KB DI KOTA KUPANG

Rocky Jhonson Napang Leo¹, Nursalam², Aspri Budi Oktavianto³

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang^{1,2,3}

Email: linanapang0301@gmail.com¹, nursalamjeppu@yahoo.com²,
aspribudi@staf.undana.ac.id³

ABSTRACT

The rapid population growth in Kupang City, particularly in Kampung KB of Lasiana Subdistrict, requires proper interventions to improve the quality of family life. This study aims to analyze the role of the Population and Family Planning Control Office (DPPKB) in increasing the participation of Family Planning (KB) participants in Kampung KB. Using a qualitative approach through a case study, this research explores the implementation of the KB program through counseling, service provision, and inter-sectoral coordination. The results show that DPPKB Kupang has successfully carried out its normative and actual roles in educating the public and providing equitable KB services. However, challenges remain in increasing the use of long-term contraceptive methods due to social stigma, limited information, and family support. The evaluation highlights the importance of a socio-cultural approach to enhance community participation. This study offers recommendations to strengthen inter-sectoral coordination and improve the distribution of KB information to achieve optimal family welfare goals.

Keywords : Population Control, Family Planning, Kampung KB, Inter-sectoral Coordination

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam meningkatkan pencapaian peserta KB pada Kampung KB. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan program KB melalui penyuluhan, penyediaan layanan, dan koordinasi antar sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKB Kota Kupang telah berhasil menjalankan peran normatif dan aktualnya dalam mengedukasi masyarakat serta menyediakan layanan KB yang merata. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam

meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang akibat stigma sosial, keterbatasan informasi, dan dukungan keluarga. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis budaya dan sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan distribusi informasi mengenai KB agar program ini dapat mencapai tujuan kesejahteraan keluarga yang optimal.

Kata Kunci : Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kampung KB, Koordinasi Lintas Sektor

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi arah pembangunan suatu negara. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan penduduk akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan. Apabila pertumbuhan penduduk berlangsung secara pesat tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup, maka berbagai permasalahan sosial dan ekonomi akan semakin kompleks. Di Indonesia, persoalan kependudukan masih menjadi isu strategis karena jumlah penduduk yang besar disertai persebaran yang belum merata. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam mengendalikan jumlah penduduk sekaligus meningkatkan kualitasnya. Pertumbuhan yang tidak terkendali dapat membebani pembangunan, menekan daya dukung lingkungan, serta memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengendalian angka kelahiran, tetapi juga pada peningkatan kualitas keluarga secara menyeluruh.

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang menghadapi kendala pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat. Salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi ini adalah Kota Kupang, yang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya akibat tingginya angka kelahiran. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak selalu diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Dampaknya terlihat pada keterbatasan lapangan kerja, tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya akses terhadap layanan dasar. Untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah menerapkan Program Keluarga Berencana sebagai salah satu kebijakan strategis nasional. Program ini bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk sekaligus mewujudkan keluarga kecil yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Keberhasilan Program KB sangat ditentukan oleh peran institusi

pelaksana di tingkat daerah, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang tahun 2023, jumlah peserta KB aktif tercatat sebanyak lebih dari dua puluh dua ribu orang yang tersebar di enam kecamatan. Metode kontrasepsi yang digunakan pun beragam, mulai dari suntik, pil, implant, IUD, hingga metode permanen seperti tubektomi dan vasektomi. Tingginya angka partisipasi ini menunjukkan bahwa program KB telah diterima secara luas oleh masyarakat. Namun demikian, masih ditemukan adanya selisih antara jumlah peserta dengan jumlah metode kontrasepsi yang digunakan, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam kontinuitas penggunaan alat kontrasepsi. Data tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pencapaian secara kuantitatif belum tentu mencerminkan keberhasilan program secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam program KB.

Dalam penelitian ini digunakan teori peran untuk melihat kesesuaian antara peran normatif dengan peran aktual yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peran normatif menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, sementara peran aktual menunjukkan bagaimana pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan program KB tidak cukup dinilai dari angka statistik semata, tetapi juga dari efektivitas edukasi, ketersediaan layanan, intensitas sosialisasi, serta kualitas komunikasi antara petugas lapangan dan masyarakat. Pelaksanaan program KB menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyediakan sarana prasarana, memastikan distribusi alat kontrasepsi yang merata, serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga. Apabila peran tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka tujuan utama program KB untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak akan tercapai secara maksimal.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kampung KB di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima. Wilayah ini memiliki jumlah pasangan usia subur yang cukup tinggi dan sebagian besar telah menjadi peserta aktif KB. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kelurahan Lasiana mencapai lebih dari lima belas ribu jiwa dengan struktur usia yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Sementara itu, jumlah pasangan usia subur tercatat sebanyak lebih dari seribu delapan ratus pasangan, dengan peserta KB aktif sekitar tujuh puluh persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif partisipasi masyarakat dalam program KB tergolong tinggi. Namun demikian, masih terdapat ratusan pasangan usia subur yang belum mengikuti program KB meskipun sebagian di antaranya menyatakan tidak ingin memiliki anak lagi. Kondisi ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara target administratif dengan realitas sosial di masyarakat.

Fenomena masih adanya pasangan usia subur yang tidak mengikuti program KB dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya stigma terhadap penggunaan kontrasepsi serta keterbatasan akses layanan kesehatan. Sebagian masyarakat masih memandang penggunaan alat kontrasepsi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai budaya atau agama, terutama untuk metode kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum merata, jarak fasilitas kesehatan yang cukup jauh, serta keterbatasan tenaga penyuluhan lapangan turut menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi KB. Di sisi lain, meskipun pencapaian peserta KB di Kelurahan Lasiana mendekati target yang ditetapkan pemerintah, tingginya angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana program KB benar-benar berdampak terhadap terwujudnya keluarga kecil yang sehat dan sejahtera.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program KB tidak cukup diukur dari tingginya jumlah peserta, tetapi juga harus dilihat dari kualitas pelaksanaan, kepuasan masyarakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang memiliki peran yang sangat strategis sebagai fasilitator, pelaksana, dan pengawas program. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan pencapaian peserta KB di Kampung KB Kota Kupang, khususnya di Kelurahan Lasiana, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran dinas terkait dalam meningkatkan pencapaian peserta KB dan apa saja faktor yang memengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan keberhasilan program KB secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan pencapaian peserta KB pada Kampung KB di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pelaksana program dan masyarakat sebagai peserta KB secara kontekstual dan komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk

melihat secara langsung aktivitas pelaksanaan program, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pihak dinas, aparat kelurahan, kader KB, serta masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelusuri arsip dan laporan program. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan strategis peran Dinas P2KB sebagai pelaksana kebijakan KB serta Kelurahan Lasiana sebagai wilayah Kampung KB yang aktif dan memiliki dinamika sosial yang beragam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan kegiatan, serta data kependudukan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling yang meliputi kepala dinas, kepala bidang, koordinator penyuluhan KB, ketua Kampung KB, pengurus Pokja, serta masyarakat peserta dan non-peserta KB. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk menjamin kredibilitas penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh mengenai peran normatif dan aktual Dinas P2KB serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program KB di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Normatif Dinas P2KB

Penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan (Notoatmodjo, 2012).

Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilakukan secara sistematis oleh BKKBN dan perangkat daerah pelaksana, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Kegiatan ini bukan hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga mencakup proses konseling yang bertujuan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi serta pentingnya mengikuti program KB. Melalui penyuluhan, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, dan mengubah perilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perencanaan keluarga. Pada akhirnya, penyuluhan KB dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berkualitas, sesuai dengan visi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional.

Secara normatif, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Kupang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan dimaksudkan sebagai sarana transfer informasi mengenai pentingnya program KB, manfaat penggunaan kontrasepsi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Berdasarkan kebijakan nasional dan pedoman pelaksanaan program Bangga Kencana, kegiatan penyuluhan seharusnya dilakukan secara rutin melalui penyuluhan lapangan KB (PLKB), kader KB, serta kegiatan lintas sektor yang melibatkan puskesmas, posyandu, sekolah, dan organisasi masyarakat. Di tingkat kota, penyuluhan telah dilakukan secara terjadwal setiap bulan melalui forum resmi, kegiatan penyuluhan kelompok, maupun kampanye tematik yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan. Kepala Dinas P2KB menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Dinas untuk menjadikan KB bukan sekadar program pengendalian penduduk, melainkan juga instrumen peningkatan kualitas hidup keluarga.

Secara normatif, kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai ujung tombak program, namun dalam praktik di Kelurahan Lasiana kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh penyuluhan, melainkan juga dibantu oleh para kader, bidan, dan pengurus Pokja Kampung KB, sebagaimana disampaikan oleh seorang kader yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pokja, Ibu Getruida Tupa, pada tanggal 10 September 2025 yang menyatakan bahwa penyuluhan tidak hanya dilakukan oleh penyuluhan, tetapi turut dibantu oleh seluruh kader dan bidan serta selalu diingatkan saat kegiatan posyandu, pustu, maupun klinik.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan di Lasiana bersifat kolaboratif. Informasi tentang KB tidak hanya disampaikan dalam forum resmi, tetapi juga secara rutin disisipkan dalam kegiatan kesehatan masyarakat seperti posyandu. Melalui cara ini, masyarakat lebih mudah menerima informasi karena disampaikan dalam situasi yang akrab dan dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan partisipatif sehingga masyarakat tidak merasa tertekan dalam menerima program KB.

Selain sebagai sarana penyampaian informasi, penyuluhan di Lasiana juga mencakup proses pendampingan langsung. Para kader tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga ikut mengantar ibu-ibu ke puskesmas atau klinik untuk memastikan mereka benar-benar memperoleh pelayanan KB. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sekretaris kader Ibu Getruida Tupa pada tanggal 10 September 2025 yang menyatakan bahwa setelah edukasi, para ibu juga diantar untuk mendapatkan pelayanan baik di pustu maupun klinik hingga selesai.

Pendampingan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan tidak berhenti pada transfer pengetahuan semata, tetapi juga mencakup tindakan nyata berupa fasilitasi

layanan. Dari sisi bidan, penyuluhan dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Bidan Ibu Etha Lay pada tanggal 16 September 2025 menyampaikan bahwa meskipun secara normatif terdapat PLKB, para bidan, kader, dan pengurus Pokja juga ikut membantu melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat agar bersedia menggunakan KB.

Temuan ini memperkuat gambaran bahwa penyuluhan KB di Lasiana telah berjalan cukup baik karena didukung oleh kolaborasi lintas aktor dan berperan penting dalam memengaruhi keputusan masyarakat untuk ber-KB. Seorang akseptor, Ibu Senni Sellu, menyatakan bahwa dirinya mengikuti KB karena mendapatkan edukasi dan pendampingan dari kader. Namun demikian, jika dianalisis menggunakan teori peran Ralph Linton, meskipun peran normatif telah terlaksana secara aktual, masih terdapat tantangan dalam partisipasi masyarakat, khususnya rendahnya kehadiran sebagian PUS dan kurangnya dukungan suami terhadap penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa hambatan bukan hanya soal intensitas penyuluhan, tetapi juga soal dukungan keluarga (suami) dan budaya yang masih memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap metode kontrasepsi tertentu.

Penyediaan Layanan

Peran normatif Dinas P2KB Kota Kupang juga mencakup penyediaan layanan KB bagi masyarakat yang disalurkan melalui puskesmas, posyandu, dan tenaga kesehatan. Layanan ini meliputi ketersediaan alat kontrasepsi, akses pelayanan medis, serta pendampingan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB. Secara normatif, Dinas berkewajiban memastikan seluruh jenis kontrasepsi tersedia dan dapat diakses oleh PUS, dengan prioritas pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti implant, IUD, MOW, dan MOP.

Hasil penelitian di Kampung KB Lasiana menunjukkan bahwa penyediaan layanan KB sudah cukup baik dan variatif. Menurut bidan Ibu Etha Lay pada tanggal 16 September 2025, pihak Dinas selalu menyesuaikan penyediaan alat kontrasepsi dengan jumlah akseptor yang mendaftar. Jika terdapat 15 akseptor, maka alat kontrasepsi yang disiapkan juga disesuaikan dengan jumlah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam distribusi layanan berdasarkan kebutuhan lapangan.

Selain penyediaan alat kontrasepsi, Dinas juga memberikan dukungan berupa bantuan biaya transportasi bagi kader serta penyediaan konsumsi saat kegiatan sosialisasi berlangsung. Dukungan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan adanya bantuan tersebut, kader dapat bekerja lebih optimal dalam menjangkau masyarakat dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Dalam praktiknya, kendati Dinas dan tenaga kesehatan mendorong penggunaan MKJP, sebagian besar masyarakat masih lebih memilih metode

kontrasepsi jangka pendek seperti suntikan dan pil. Menurut bidan Ibu Etha Lay, masyarakat cenderung memilih implan karena dianggap lebih mudah dibandingkan spiral atau IUD yang masih dianggap menakutkan serta menimbulkan rasa malu akibat faktor budaya dan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat.

Layanan KB di Lasiana juga bersifat fleksibel. Kader menyampaikan bahwa masyarakat dapat datang kapan saja untuk meminta dipasangkan alat kontrasepsi tanpa harus menunggu jadwal tertentu. Jika ada ibu yang tiba-tiba ingin memasang alat, kader akan langsung membantu mengantar ke puskesmas atau klinik terdekat agar segera mendapatkan pelayanan.

Dari sisi masyarakat, layanan KB dirasakan cukup baik. Seorang akseptor, Ibu Senni Sellu, mengaku memilih KB spiral selama delapan tahun karena ingin membatasi jumlah kelahiran. Sementara itu, informan lain, Ibu Vony Feek, menceritakan pengalamannya berganti metode karena efek samping dari KB suntik. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keputusan memilih metode KB sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, efek samping, dan kenyamanan.

Jika dikaitkan dengan teori peran Ralph Linton, maka penyediaan layanan KB oleh Dinas P2KB dapat dianalisis melalui peran normatif dan peran aktual. Secara normatif, Dinas bertanggung jawab menyediakan layanan KB yang komprehensif, merata, dan berkelanjutan, termasuk memastikan seluruh jenis alat kontrasepsi tersedia serta menjamin akses layanan yang mudah bagi semua PUS.

Secara aktual, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas dan kader telah berupaya memprioritaskan MKJP, minat masyarakat masih didominasi oleh metode jangka pendek. Faktor psikologis berupa rasa takut terhadap prosedur medis, faktor praktis dan fleksibilitas, serta keterbatasan akses layanan pemasangan MKJP menjadi penyebab utama rendahnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

Dalam konteks ini, peran aktual Dinas, penyuluhan, dan kader menjadi lebih adaptif. Mereka tidak memaksakan masyarakat menggunakan MKJP, tetapi memberikan pilihan sesuai kebutuhan dan kondisi PUS. Kader bahkan secara aktif membantu masyarakat yang ingin ber-KB secara mendadak dengan mengantar langsung ke fasilitas kesehatan. Pola ini menjadikan layanan KB di Lasiana bersifat fleksibel dan responsif.

Perbedaan antara peran normatif dan aktual tidak dapat dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas sosial masyarakat. Secara normatif, kewajiban penyediaan layanan KB telah terpenuhi, sementara secara aktual layanan mengalami penyesuaian agar tetap inklusif dan berkelanjutan. Adaptasi ini menjadi kekuatan program KB di tingkat akar rumput meskipun penggunaan MKJP masih belum optimal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program KB di Kampung KB Lasiana

Faktor Kebijakan

Secara normatif, DP2KB Kota Kupang memiliki peran strategis dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas tersebut mencakup penyusunan rencana kerja tahunan KB, pembinaan Kampung KB, penyediaan tenaga penyuluhan lapangan (PLKB), serta koordinasi lintas sektor dengan dinas kesehatan, kelurahan, dan organisasi masyarakat. Di Kampung KB Lasiana, kebijakan ini telah diterjemahkan cukup baik melalui penguatan Kampung KB, peningkatan capaian peserta KB aktif dengan fokus pada MKJP, peningkatan peran kader, serta integrasi layanan KB dengan program kesehatan reproduksi dan gizi keluarga.

Kebijakan DP2KB Kota Kupang dijalankan melalui tiga bidang utama, yaitu bidang pengendalian penduduk, bidang KB dan kesehatan reproduksi, serta bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Menurut Bapak Samuel Trisno Berek selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB dan Kader KB, kebijakan yang ditetapkan di tingkat kota diterjemahkan langsung dalam aktivitas nyata di kelurahan melalui kerja sama antara penyuluhan, kader, bidan, dan pihak posyandu. Walaupun jumlah PLKB terbatas, sistem kebijakan yang menekankan kolaborasi menjadikan kader sebagai perpanjangan tangan Dinas di masyarakat.

Implementasi kebijakan DP2KB diwujudkan melalui koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal dilakukan dari Dinas ke UPTD/UPT, dilanjutkan ke penyuluhan KB, kader, dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi horizontal dilakukan antara DP2KB dengan puskesmas, Dinas Kesehatan, pemerintah kelurahan, serta lembaga masyarakat. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan lintas sektor nonkesehatan, khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat, masih belum optimal, padahal faktor sosial budaya sangat memengaruhi penerimaan program KB.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peran koordinatif Dinas masih cenderung sektoral dan terfokus pada bidang kesehatan. Berdasarkan teori peran Ralph Linton, koordinasi berjenjang ini mencerminkan peran normatif yang diharapkan dari lembaga pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, peran aktual mengalami pergeseran karena keterbatasan jumlah penyuluhan dan lemahnya keterlibatan lintas sektor, sehingga sebagian pelaksanaan teknis banyak bertumpu pada kader dan posyandu di tingkat bawah.

DP2KB tetap menjalankan peran koordinatifnya secara adaptif melalui mekanisme informal seperti komunikasi langsung, rapat rutin, serta pemanfaatan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp. Koordinasi yang berjalan efektif di Kampung KB Lasiana ditandai oleh adanya komunikasi dua arah antara

penyuluhan, kader, dan masyarakat, respons cepat terhadap laporan kader, serta pelibatan kader dalam kegiatan bersama tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga partisipatif.

Kebijakan DP2KB juga diterapkan dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal, di mana perencanaan dan distribusi alat kontrasepsi disesuaikan dengan jumlah akseptor di lapangan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan berupa rendahnya koordinasi lintas sektor nonkesehatan seperti tokoh agama, pendidikan, dan lembaga sosial. Oleh karena itu, meskipun DP2KB Kota Kupang telah menjalankan peran strategisnya dengan baik melalui penguatan kader dan integrasi layanan, diperlukan penguatan kebijakan lintas sektor agar program KB tidak hanya dipahami sebagai urusan kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi keluarga.

Faktor Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor krusial yang secara langsung memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Faktor anggaran menentukan keberlanjutan dan jangkauan program KB di masyarakat. Sebagai lembaga daerah, DP2KB Kota Kupang memperoleh alokasi dana dari APBD serta transfer dari BKKBN pusat untuk pelaksanaan program KB, termasuk pengadaan alat kontrasepsi, operasional penyuluhan, dan pelatihan kader. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan peran DP2KB Kota Kupang. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB dan Kader KB, Bapak Samuel Trisno Berek, yang menyatakan bahwa anggaran yang diterima relatif kecil sehingga banyak kegiatan lapangan harus dilakukan secara efisien, bahkan dengan dukungan tenaga kader yang bekerja secara sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan sebagian kegiatan dilaksanakan dengan dukungan sukarela dari kader di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara peran normatif (expected role) dan peran aktual (performed role) DP2KB. Secara normatif, Dinas diharapkan mampu memberikan dukungan finansial penuh terhadap setiap kegiatan KB di wilayah binaan, namun dalam praktiknya pelaksanaan program sangat bergantung pada dedikasi dan partisipasi masyarakat. Meski demikian, DP2KB tetap berupaya menjaga keberlanjutan kegiatan melalui efisiensi anggaran serta kerja sama dengan puskesmas agar layanan KB tetap berjalan secara optimal.

Di Kelurahan Lasiana, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan anggaran dari Dinas tetap dirasakan oleh masyarakat dan kader dalam bentuk bantuan logistik kegiatan seperti alat kontrasepsi, konsumsi kegiatan, transportasi kader, serta insentif penyuluhan. Hal ini disampaikan oleh salah satu kader, Ibu Getruida Tupa, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dari Dinas selalu disertai dengan bantuan snack dan ongkos transportasi sehingga kader tetap bersemangat

mengikuti penyuluhan. Motivasi para kader dalam menjalankan tugas lebih banyak bersumber dari kesadaran sosial dan tanggung jawab moral, bukan semata-mata karena insentif finansial.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa kader memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara masyarakat dan Dinas. Mereka membantu menyampaikan informasi, melakukan pendataan keluarga, mengantar Pasangan Usia Subur (PUS) ke fasilitas kesehatan, serta mendampingi kegiatan penyuluhan. Meskipun kegiatan tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, para kader tetap berpartisipasi aktif karena adanya rasa memiliki terhadap program KB serta dukungan sosial dari penyuluhan dan pihak kelurahan.

Fenomena ini mencerminkan bahwa keterbatasan dukungan anggaran tidak selalu menjadi hambatan mutlak, karena faktor sosial dan kesadaran peran turut memengaruhi kinerja kader. Dalam perspektif teori peran Ralph Linton, kondisi ini termasuk dalam konsep internalized role, yaitu ketika individu menjalankan perannya bukan hanya karena tuntutan kelembagaan, tetapi juga karena nilai sosial dan tanggung jawab moral yang telah tertanam dalam dirinya. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Samuel Trisno Berek bahwa meskipun dana terbatas, Dinas tetap berupaya memberikan dukungan berupa transportasi dan konsumsi agar semangat kader tetap terjaga.

Meskipun DP2KB telah menjalankan perannya dalam penyediaan anggaran dasar sesuai mekanisme, dana yang diterima di tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Akibatnya, sebagian besar kegiatan kader bersifat sukarela dan intensitas penyuluhan belum selalu konsisten setiap bulan. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada pelatihan kader serta ketersediaan alat kontrasepsi gratis yang terkadang bergantung pada distribusi pusat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi dana dan penguatan koordinasi agar keberlanjutan program KB di tingkat kelurahan dapat berjalan lebih stabil dan berkesinambungan.

Faktor Stigma Sosial dan Budaya

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di wilayah Kelurahan Lasiana tidak terlepas dari kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Faktor sosial budaya menjadi dimensi paling kompleks yang dihadapi DP2KB Kota Kupang dalam pelaksanaan program KB. Meskipun berbagai program edukasi telah dijalankan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh nilai budaya dan pandangan agama yang berpengaruh terhadap penerimaan KB. Budaya malu dan rasa takut terhadap prosedur medis masih menjadi hambatan utama, khususnya dalam penggunaan alat kontrasepsi seperti spiral dan implant yang dianggap "menakutkan" atau "tidak alami". Salah satu informan, Ibu Bidan Etha Lay, menyatakan bahwa banyak ibu merasa malu dan takut saat akan menggunakan spiral karena harus diperiksa di bagian dalam, meskipun telah dijelaskan bahwa prosedur tersebut tidak berbahaya.

Selain hambatan budaya, faktor dominasi suami dalam pengambilan keputusan keluarga juga masih sangat kuat. Beberapa ibu yang telah mendapatkan penyuluhan dan berniat mengikuti program KB justru tidak diizinkan oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan terkait KB masih bersifat patriarkis dan belum sepenuhnya menjadi hasil kesepakatan bersama berdasarkan kesadaran reproduktif. DP2KB sebenarnya telah berupaya mengatasi hambatan ini melalui program Edukasi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) serta pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan kader dan tokoh masyarakat sebagai komunikator lokal. Namun, keterlibatan tokoh agama dan adat yang belum konsisten membuat hasilnya belum optimal. Bapak Samuel Trisno Berek menegaskan bahwa peran tokoh agama sangat penting karena masyarakat lebih mudah percaya jika penyuluhan dilakukan melalui gereja atau pertemuan warga.

Berdasarkan kondisi tersebut, peran DP2KB dalam menangani hambatan sosial budaya perlu diperluas, tidak hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga strategi sosio-kultural yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda. Pendekatan berbasis nilai lokal, seperti konsep “perencanaan keluarga untuk kesejahteraan anak”, dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk menyesuaikan pesan KB dengan konteks budaya masyarakat Kupang yang religius dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Dengan strategi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB dapat meningkat secara lebih alami dan berkelanjutan.

Faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan program KB di Kampung KB Lasiana. Kendati masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat, strategi pendekatan persuasif berbasis budaya dan keagamaan yang diterapkan oleh DPPKB, penyuluhan, dan kader berhasil menciptakan iklim sosial yang lebih terbuka terhadap program KB. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program bukan hanya soal penyediaan fasilitas, tetapi juga bagaimana lembaga pemerintah mampu memainkan perannya sebagai jembatan antara kebijakan dan budaya masyarakat.

Dengan kata lain, keberhasilan peran DPPKB di Lasiana merupakan hasil dari kemampuan adaptasi sosial terhadap nilai-nilai budaya lokal, sebagaimana dijelaskan Ralph Linton bahwa peran sosial selalu bersifat dinamis dan menyesuaikan diri terhadap sistem sosial tempat peran tersebut dijalankan.

Faktor Keterbatasan Informasi

Keterbatasan informasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Kampung KB Lasiana, khususnya di kalangan pasangan usia subur (PUS). Keterbatasan ini tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap informasi, tetapi juga menyangkut kualitas pemahaman, tingkat literasi kesehatan, serta persepsi masyarakat terhadap KB. Peran DP2KB dalam penyediaan informasi sangat menentukan keberhasilan program, sebab pemahaman yang baik akan manfaat dan cara kerja alat kontrasepsi

menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan ber-KB. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lasiana masih belum memahami perbedaan jenis kontrasepsi, efek samping, bahkan masih ada anggapan bahwa KB dapat menyebabkan kemandulan.

Kesalahpahaman tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Getruida Tupa yang menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang takut menggunakan KB karena menganggapnya dapat menyebabkan tidak bisa memiliki anak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selama ini, penyuluhan lebih sering dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan posyandu, sehingga pesertanya terbatas pada ibu-ibu yang hadir. Kelompok lain seperti remaja, calon pengantin, dan para suami masih relatif jarang terlibat dalam kegiatan informasi dan edukasi KB.

DP2KB sebenarnya memiliki program Edukasi Remaja dan GenRe (Generasi Berencana) yang bertujuan menanamkan pemahaman sejak dini mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga. Namun, pengimplementasian program tersebut di Kampung KB Lasiana masih belum intensif. Media informasi yang digunakan juga masih dominan secara lisan, sehingga masyarakat mudah lupa terhadap materi penyuluhan. Belum tersedia media visual seperti video edukatif, spanduk, atau papan informasi permanen di lingkungan kelurahan yang dapat memperkuat pesan KB secara berkelanjutan. Rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses terhadap media informasi juga memperparah kondisi tersebut.

Dari sisi kelembagaan, DPPKB Kota Kupang telah berupaya meningkatkan penyebarluasan informasi melalui berbagai cara, seperti penyebarluasan poster dan brosur, penyuluhan lapangan bersama kader dan tenaga kesehatan, pelayanan KB keliling, kampanye sosial, serta pelatihan komunikasi bagi penyuluhan dan kader. Namun, intensitas penyampaian informasi dinilai masih belum optimal akibat keterbatasan jumlah tenaga penyuluhan dan belum tersedianya sistem informasi terpadu. Hal ini menyebabkan masih adanya kesenjangan informasi antara masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan KB dan masyarakat yang kurang terpapar informasi.

Keterbatasan informasi ini tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Masyarakat yang kurang terlibat cenderung memiliki persepsi keliru terhadap KB sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi. Dalam kondisi ini, kader berperan sebagai jembatan komunikasi antara Dinas dan masyarakat melalui kunjungan rumah, pembagian leaflet, serta penjelasan langsung yang mudah dipahami. Dalam perspektif teori peran Ralph Linton, kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara peran normatif Dinas sebagai penyedia informasi dan peran aktual kader yang menjalankan fungsi edukatif secara langsung melalui pendekatan sosial dan budaya sesuai karakteristik masyarakat Lasiana. Jika kamu mau, saya juga bisa bantu

menyesuaikan dengan gaya bahasa skripsi atau jurnal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan informasi bukan semata hambatan teknis, tetapi tantangan sosial yang menuntut DPPKB Kota Kupang untuk terus memperkuat fungsi komunikasi, literasi kesehatan, dan kolaborasi berbasis komunitas. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan merasa dilibatkan dalam proses komunikasi, maka tingkat keberhasilan program KB akan meningkat secara signifikan.

Pendampingan dan Evaluasi Program KB di Kampung KB Lasiana

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di tingkat masyarakat tidak hanya bergantung pada keberhasilan penyuluhan dan penyediaan layanan, tetapi juga pada efektivitas sistem pendampingan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pelaksana kebijakan, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Kupang. DP2KB memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pelaksanaan program KB di wilayah Kota Kupang, termasuk di Kampung KB Kelurahan Lasiana. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pembina, fasilitator, dan pengendali mutu terhadap seluruh kegiatan KB di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kegiatan pendampingan dan evaluasi oleh DP2KB Kota Kupang di Lasiana menunjukkan dinamika yang cukup baik. Walaupun masih terdapat keterbatasan tenaga dan sumber daya, Dinas telah melaksanakan peran normatifnya secara aktual dengan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Adapun pembahasan berikut menguraikan empat dimensi utama pendampingan dan evaluasi, yaitu pemantauan dan pendampingan, hasil, dampak, serta evaluasi.

Pemantauan dan Pendampingan

Pemantauan dan pendampingan merupakan fungsi inti DP2KB Kota Kupang untuk memastikan program Keluarga Berencana berjalan sesuai dengan tujuan nasional BKKBN dan kebutuhan masyarakat lokal. Secara normatif, dinas bertanggung jawab melakukan supervisi, pembinaan, serta asistensi teknis kepada penyuluh KB, bidan, dan kader di tingkat kelurahan. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan PLKB dan Kader KB, Samuel Trisno Berek, menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah penyuluh membuat kader menjadi perpanjangan tangan dinas di lapangan. Pendampingan dilakukan melalui pelatihan, rapat koordinasi, serta kunjungan lapangan, sehingga tercipta sistem pendampingan berlapis dari dinas ke penyuluh, lalu ke kader dan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya peran kader dalam menjalankan fungsi edukatif, administratif, dan sosial di masyarakat.

Di Kampung KB Lasiana, pemantauan dan pendampingan dilakukan melalui beberapa mekanisme. Secara struktural dan administratif, dinas menerima laporan rutin dari penyuluh melalui UPTD terkait jumlah akseptor, ketersediaan alat kontrasepsi, serta kegiatan penyuluhan. Kegiatan besar seperti pelayanan KB gratis

juga dipantau langsung oleh pihak dinas. Selain itu, pendampingan lapangan dilakukan melalui kunjungan langsung, pembinaan kader, serta komunikasi intensif antara penyuluhan dan masyarakat. Kader tidak hanya memberikan edukasi kepada pasangan usia subur, tetapi juga mendampingi pemasangan alat kontrasepsi hingga mengantar masyarakat ke puskesmas jika diperlukan. Di era digital, pendampingan diperkuat dengan komunikasi melalui grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi cepat dalam pelayanan mendesak.

Selain kegiatan teknis, DP2KB juga membina kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari penguatan keluarga berencana secara berkelanjutan. Pendampingan di Lasiana bersifat partisipatif dan adaptif, terlihat dari kemampuan kader dan penyuluhan merespons kebutuhan masyarakat meskipun di luar jadwal resmi. Peran dinas tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai mentor sosial yang membimbing dan memperkuat kapasitas pelaksana lapangan. Pendampingan ini mencerminkan peran koordinatif, adaptif, sekaligus kultural, karena disertai pembinaan sikap, komunikasi interpersonal, dan motivasi. Dengan pola partisipatif tersebut, pendampingan menjadi proses pemberdayaan sosial yang menumbuhkan tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan program KB.

Hasil Pelaksanaan Pendampingan

Hasil pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Kupang bersama penyuluhan dan kader menunjukkan perkembangan yang positif dan signifikan, baik dari aspek administratif, teknis, maupun sosial. Pendampingan yang dilakukan secara rutin telah berdampak pada peningkatan kapasitas kader, perbaikan sistem pelaporan, serta bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang berkelanjutan.

Dari aspek administratif, mekanisme pelaporan kegiatan telah berjalan lebih tertib dan sistematis. Kader dan penyuluhan secara rutin menyusun laporan kegiatan penyuluhan, pendataan akseptor baru, serta hasil pelayanan lapangan yang kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) milik BKKBN. Dengan sistem ini, pemantauan menjadi lebih cepat dan akurat karena data langsung terintegrasi hingga tingkat kota dan provinsi. Samuel Trisno Berek menjelaskan bahwa transformasi digital melalui SIGA membuat perkembangan setiap wilayah dapat dipantau secara real time. Laporan bulanan dari kader dan bidan yang mencakup data akseptor, pasangan usia subur baru, penghentian penggunaan alat kontrasepsi, serta distribusi alkon juga memperkuat basis data untuk kebijakan berbasis bukti.

Dari sisi hasil teknis, tingkat kesertaan aktif peserta KB di Lasiana mencapai

sekitar 72,6% dari total pasangan usia subur, yang menunjukkan keberhasilan pendampingan dalam menjaga partisipasi masyarakat. Layanan KB juga bersifat fleksibel dan gratis sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun demikian, penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntik dan pil masih lebih dominan dibandingkan metode jangka panjang. Keberhasilan kuantitatif ini didukung oleh peran aktif kader dan penyuluhan yang konsisten melakukan penyuluhan melalui posyandu, kunjungan rumah, serta pelayanan KB keliling. Samuel Trisno Berek menegaskan bahwa keberhasilan pendampingan bukan hanya tentang laporan, tetapi juga membangun hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat.

Hasil pendampingan juga sangat terasa pada aspek sosial, khususnya dalam peningkatan kepercayaan antara masyarakat dan tenaga lapangan. Kader yang berasal dari lingkungan setempat mampu menjadi jembatan sosial yang efektif karena memiliki kedekatan emosional dan memahami karakter masyarakat. Hubungan yang bersifat kekeluargaan membuat masyarakat lebih terbuka untuk berkonsultasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan keberhasilan komunikasi persuasif, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program KB sebagai kebutuhan keluarga, bukan sekadar program pemerintah.

Pendampingan yang intensif juga mendorong kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan KB. Masyarakat merasa terbantu karena kader tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendampingi proses pelayanan dari awal hingga akhir. Seorang akseptor, Ibu Leandra Djo, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat informasi dari kader, diantar ke klinik, dan dibantu hingga pelayanan selesai dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat menuju kesadaran baru tentang pentingnya perencanaan keluarga. Pendampingan yang dijalankan tidak lagi sekadar rutinitas administratif, melainkan telah menjadi interaksi sosial yang bermakna dalam membangun kepercayaan dan memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat.

Dampak Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan oleh DP2KB Kota Kupang membawa dampak positif yang luas terhadap kader, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Melalui pendampingan serta pelatihan berkala, kader dan tenaga kesehatan menjadi semakin terampil dalam memberikan konseling, menangani efek samping ringan, serta menyampaikan pesan KB secara persuasif dan mudah dipahami masyarakat. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri kader dalam mendampingi calon akseptor. Di sisi masyarakat, pendampingan berhasil membangun rasa percaya terhadap program KB yang sebelumnya masih disertai rasa takut atau ragu. Warga kini lebih terbuka untuk datang ke fasilitas kesehatan dan semakin cepat mengambil keputusan ber-KB, sehingga angka unmet need dapat

ditekan karena setiap niat masyarakat segera ditindaklanjuti oleh kader dan penyuluhan.

Dampak pendampingan juga dirasakan oleh kelembagaan DP2KB itu sendiri. Melalui laporan dari kader dan penyuluhan, Dinas memperoleh data empiris langsung dari lapangan yang sangat berguna sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program. Dinas dapat mengidentifikasi tren kebutuhan masyarakat, menyesuaikan strategi pelayanan, serta memperbaiki distribusi alat kontrasepsi secara lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa DP2KB tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai lembaga pembelajar yang terus beradaptasi dengan dinamika sosial. Secara teoretis, peran ini mencerminkan perilaku peran yang adaptif dan kontekstual sebagaimana dijelaskan dalam teori Linton.

Program KB di Kampung KB Kelurahan Lasiana juga terbukti memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang aktif mengikuti program KB umumnya merasakan kehidupan rumah tangga yang lebih teratur dan stabil, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun keharmonisan keluarga. Dengan jumlah dan jarak kelahiran anak yang lebih terencana, keluarga dapat mengatur keuangan dengan lebih baik, memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan hubungan rumah tangga yang lebih harmonis. Temuan lapangan menunjukkan bahwa peserta KB aktif cenderung memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik dibandingkan yang belum berpartisipasi. Dengan demikian, keberhasilan program KB di Lasiana tidak hanya meningkatkan partisipasi ber-KB, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga sesuai dengan tujuan mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Evaluasi Program KB di Kampung KB Lasiana

Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan DP2KB Kota Kupang untuk menilai efektivitas program dan menjamin keberlanjutan pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik triwulan maupun tahunan, melalui laporan penyuluhan dan kader serta pemantauan langsung ke lapangan. Pernyataan Ibu Susana Manafe selaku Kabid Pengendalian Penduduk dan Plt Sekretaris pada 1 Oktober 2025 menegaskan bahwa ketika ditemukan penurunan peserta, hal tersebut dibahas bersama dalam forum rapat untuk mencari solusi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi di DP2KB bersifat berjenjang dan partisipatif, tidak hanya dilakukan di tingkat kantor, tetapi juga melibatkan pelaksana di lapangan seperti penyuluhan, kader, bidan, dan perangkat kelurahan sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama.

Evaluasi administratif dan kinerja menjadi dasar utama dalam mengukur capaian program secara kuantitatif. Setiap triwulan, Dinas meninjau jumlah peserta KB aktif dan akseptor baru, stok serta distribusi alat kontrasepsi, jumlah kegiatan penyuluhan, serta capaian target sesuai ketentuan BKKBN. Seluruh data tersebut

direkap melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan diverifikasi melalui pengecekan lapangan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Meskipun demikian, Dinas memandang bahwa keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh angka. Data yang baik belum tentu mencerminkan keberhasilan apabila masyarakat masih diliputi rasa takut atau penolakan terhadap KB. Oleh karena itu, perubahan sikap masyarakat turut menjadi indikator penting dalam proses evaluasi.

Selain evaluasi administratif, DP2KB juga menerapkan evaluasi partisipatif dengan melibatkan kader, bidan, penyuluhan, dan perangkat kelurahan melalui rapat koordinasi bulanan. Forum ini menjadi ruang terbuka untuk membahas kendala di lapangan, strategi peningkatan partisipasi, inovasi penyuluhan, serta rencana tindak lanjut. Pendekatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama terhadap program KB, sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Melalui evaluasi partisipatif, seluruh pihak tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai aktor reflektif yang turut menentukan arah pengembangan program di masa mendatang.

Evaluasi juga dilakukan terhadap dampak sosial dan perilaku masyarakat melalui observasi, wawancara, serta diskusi kelompok terarah. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat Lasiana terhadap program KB, dari yang semula dianggap tabu menjadi dipahami sebagai upaya mencapai kesejahteraan keluarga. Perubahan ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis tahunan, seperti peningkatan kampanye MKJP, pelibatan tokoh agama dan adat, pelatihan komunikasi bagi kader, serta pemanfaatan media digital untuk penyuluhan. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pelaporan, tetapi menjadi landasan perbaikan berkelanjutan agar kebijakan yang dihasilkan semakin kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran DPPKB Kota Kupang dalam meningkatkan pencapaian peserta KB di Kampung KB Kelurahan Lasiana, dapat disimpulkan bahwa DPPKB telah menjalankan perannya secara optimal melalui tiga dimensi utama, yaitu penyuluhan, penyediaan layanan, dan koordinasi. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti posyandu, kunjungan rumah, serta kegiatan sosial masyarakat dengan dukungan kader dan tenaga kesehatan, meskipun jumlah penyuluhan terbatas. Dalam penyediaan layanan, DPPKB bekerja sama dengan puskesmas dan tenaga kesehatan dengan fokus pada metode kontrasepsi jangka panjang, disertai pendekatan edukatif untuk mengatasi keraguan masyarakat. Sementara itu, koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital menjadi kunci keberlanjutan program. Pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi oleh faktor kebijakan yang bersifat nasional namun disesuaikan secara lokal, keterbatasan anggaran, stigma sosial dan budaya, serta

keterbatasan informasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan membuktikan bahwa keberhasilan program KB ditentukan oleh keseimbangan antara faktor struktural dan kultural di masyarakat.

Pendampingan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan program KB di lapangan. Pendampingan dilakukan melalui pelatihan, kunjungan rutin, serta komunikasi intensif antara Dinas dan kader, sehingga terbentuk rasa percaya dan motivasi kerja yang tinggi. Evaluasi dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh unsur pelaksana dan masyarakat agar tercipta sistem perbaikan berkelanjutan. Dari proses tersebut, program KB di Lasiana menunjukkan dampak sosial yang positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, menguatnya hubungan sosial antara kader dan masyarakat, perubahan perilaku dari penolakan menjadi penerimaan terhadap kontrasepsi, serta terbangunnya kolaborasi antarinstansi dan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa peran DPPKB tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif karena mampu mendorong perubahan sosial menuju kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi revi). Rineka Cipta.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2017). Pedoman umum Kampung KB. BKKBN.
- Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. Annual Review of Sociology. 12, 67–92.
- BKKBN. (2021). Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
- Creswell, J. W. (2010). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). SAGE Publications.
- Fatimah, S. S. (2019). Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2018 (Studi Kasus : Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta). 4(1), 1–23.
- Goode, W. J. (1960). A Theory of Role Strain. American Sociological Review. 25(4), 483–496.
- Kampung Keluarga Berkualitas. (2025). Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). <https://kampungkb.bkkbn.go.id/>
- Larasti. (2018). Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Penduduk di Kota Medan.
- Lensini, J. G. (2023). Implementasi Program KB Dalam Pengendalian Penduduk Untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera di Kota Kupang Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Linton, R. (1936). *The Study of Man: An Introduction*. New York: Appleton-Century-Crofts.

Melco, N. S. (2021). Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Pencapaian Program Metode Kontrasepsi Pada Kampung Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.

Notoatmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta.

Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sarwono, W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods). Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Alfabeta.

Tatuhe, S., Laloma, A., & Pesoth, W. F. (2016). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. E-Jurnal UNSRAT, 1(1), 1-13.

WEBSITE

Kampung Keluarga Berkualitas. (2025). Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> diakses pada 18 April 2025, pukul 20.04 WITA

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/tentang>, diakses pada 15 Februari 2025, 11.05 WITA

<https://dppkb.kupangkota.go.id/>, diakses pada 20 September 2025, 17.03 WITA